

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Suatu instansi pemerintahan atau perusahaan bahkan lembaga (khususnya lembaga pendidikan) baik besar maupun kecil harus menyusun *budget* atau anggaran sebagai suatu landasan dalam membuat perencanaan dan untuk mengendalikan setiap kegiatannya. Anggaran merupakan bagian penting dari sistem pengendalian manajemen yang disusun suatu lembaga guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi tersebut.

Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif, yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan lembaga dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Anggaran menjamin pelaksanaan rencana kerja sesuai dengan yang direncanakan dalam anggaran, setelah suatu rencana kerja dipilih untuk mencapai sasaran anggaran. Penganggaran merupakan komitmen manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapatan, biaya, dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

Ruang lingkup reformasi meliputi perubahan struktur anggaran dan proses penganggaran. Perubahan ini dimaksud untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dalam otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja dengan mengutamakan upaya pencapaian hasil atau *output* dari perencanaan atau lokasi biaya atau input yang ditetapkan. Perubahan tersebut berpegang pada prinsip manajemen keuangan daerah yaitu akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengadilan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan ruang lingkup keuangan daerah yang dikelola langsung

berupa rencana yang diperkirakan untuk satu periode tertentu, beserta susulan, cara-cara memenuhi penerimaan dan pengeluaran tersebut. Peraturan Menteri Dalam Negri No.13 Tahun 2006 merupakan pedoman yang digunakan dalam penyusunan,dan pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Prinsip-prinsip penganggaran pemerintah diantaranya :

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan.

2. Disiplin Anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang diharapkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

3. Keadilan Anggaran

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggaran secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat.

4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggung jawabkan, dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk



dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat.

5. Disusun dengan Pendekatan Kinerja

Hasil kerja pemerintah harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang ditetapkan.

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sebagai Dinas Pendidikan yang baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi dengan tujuan agar setiap isu strategis yang merupakan tuntutan dari masyarakat dalam proses pelaksanaan anggaran.

Pelaksanaan Anggaran tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya perencanaan anggaran yang cukup matang dan mantap. Pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan atau ditetapkan. Mekanisme Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Barang dan Jasa sangatlah penting bagi suatu instansi, sehingga penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimana proses pembayaran anggaran barang dan jasa sampai terlaksananya anggaran tersebut.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur dalam pelaksanaan anggaran barang dan jasa pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana mekanisme pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat?

1.3 TUJUAN PENULISAN



Adapun tujuan dalam penulisan laporan ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan anggaran barang dan jasa pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mempraktikkan ilmu teori yang di dapat dari perkuliahan lapangan (Instansi Pemerintah) yang sesuai dengan jurusan yaitu Keuangan Negara dan Daerah, Program Diploma III, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
3. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap dunia kerja.
4. Untuk mengetahui masalah-masalah yang muncul dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Mekanisme Pembayaran Anggaran Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
5. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi Keuangan Negara dan Daerah, Program Diploma III, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

1.4 MANFAAT PENULISAN

Adanya manfaat yang diperoleh bagi penulis :

1. Menumbuhkan sikap disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan.
2. Untuk dapat mempersiapkan diri sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dalam menghadapi persaingan di dunia kerja pada masa yang akan datang.

Manfaat magang bagi universitas adalah :

1. Menciptakan SDM (Sumber Daya Manusia) dengan keahlian professional yang dapat bersaing dalam dunia kerja.

2. Menjalinkan kerjasama serta hubungan baik antar kependidikan dengan instansi pemerintah.

Manfaat magang dari instansi pemerintah adalah :

1. Menyediakan fasilitas dan mendukung program pendidikan di Indonesia.
2. Menjalinkan hubungan baik antar dunia pendidikan dengan instansi pemerintah.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat waktu dan kegiatan magang, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang penjelasan teoritis berupa pengertian anggaran, fungsi anggaran, prinsip anggaran, pelaksanaan anggaran belanja daerah, landasan hukum yang mengatur anggaran pemerintah.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum sejarah berdirinya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, visi misi dan nilai dasar, tujuan, sasaran, strategi dan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan mengenai mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan Povinsi Sumatera Barat.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

